

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Menambah wawasan mengenai etika profesi, sumpah profesi dan peraturan profesi yang harus dilakukan saat bekerja
2. Menambah wawasan mengenai manajerial apotek
3. Menambah wawasan mengenai sistem administrasi apotek
4. Menambah wawasan dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktek sebagai apoteker
5. Menambah wawasan mengenai pelayanan apoteker yang harus dilakukan seperti swamedikasi, pusat informasi obat dan konseling

5.2. Saran

1. Apoteker diharapkan dapat selalu mengedepankan etika profesi yang bertanggung jawab pada undang-undang dan peraturan profesi
2. Apoteker diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman untuk selalu mengerti keadaan yang terbaru
3. Apoteker diharapkan bisa mengutamakan prinsip *patient oriented*/mengutamakan pasien
4. Apoteker diharapkan bisa menjadi pemimpin dimana pun berada terutama pada saat praktek profesi

DAFTAR PUSTAKA

- BNFC, 2019. *BNF For Children (BNFC) 2019-2020*. BMJ Group and Pharmaceutical Press. UK: BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Katzung, B.G. and Trevor, A.J., 2011, *Basic and Clinical Pharmacology 13th edition*, McGraw-Hill, USA.
- Lemke, T,L., Williams, D,A., Roche, V, F., and Zito, S, W. 2013, *Foye's Principles of Medicinal Chemistry*, Wolters Kluwer: China.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, America Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Peraturan Organisasi tentang Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia, 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta: Republik Indonesia.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Pemerintah RI; 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat.
- Sweetman, S.C. 2009, *Martindale 36 the Complete Drug Reference* London: Pharmaceutical Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.